

PROSES PEMBENTUKAN BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)

Kartini¹, Hafizah Tarihoran²

kartinisikumbang@gmail.com¹, hafizahtarihoran13@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang proses terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta mengulas secara mendalam isi dua sidang utama yang pernah dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Pembentukan BPUPKI oleh pemerintah pendudukan Jepang dilakukan menjelang berakhirnya kekuasaan mereka di Indonesia, sebagai bagian dari janji kemerdekaan yang diumumkan pada September 1944. Walaupun didirikan oleh pihak kolonial, keberadaan BPUPKI justru menjadi wadah bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk merancang dasar negara dan arah masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Sidang pertama yang berlangsung dari akhir Mei hingga awal Juni 1945 berfokus pada pembahasan mengenai dasar negara. Dalam forum ini, ide-ide besar bermunculan, di antaranya dari Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo. Adapun sidang kedua yang digelar pada Juli 1945 lebih diarahkan pada perumusan konstitusi, termasuk penyusunan Piagam Jakarta yang dirancang sebagai bagian pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Hasil dari kedua sidang ini menjadi pijakan utama dalam proses pembentukan negara Indonesia yang berdaulat. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa telah memiliki wawasan politik dan pemikiran tentang kenegaraan yang matang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dinyatakan secara resmi.

Kata Kunci: BPUPKI, Kemerdekaan Indonesia, Sidang Pertama, Sidang Kedua, Dasar Negara, Konstitusi.

ABSTRACT

This paper examines the establishment process of the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (BPUPKI) and provides a comprehensive review of its two major deliberative sessions. Formed by the Japanese colonial administration toward the end of its occupation in Indonesia, BPUPKI was part of a political promise of independence announced in September 1944. Despite being initiated under colonial authority, the committee became an important platform for Indonesian nationalists to shape the foundational principles of the future state and outline the direction of an independent Indonesia. The first session, held between late May and early June 1945, concentrated on exploring ideas for the state's ideological foundation, with influential contributions from Soekarno, Mohammad Yamin, and Soepomo. The second session, convened in July 1945, was devoted to the drafting of a national constitution, which included discussions surrounding the Jakarta Charter, envisioned as the preamble to the Constitution. Collectively, the outcomes of these sessions laid a critical framework for the birth of an independent Indonesian state. The process demonstrates that national leaders possessed a high level of political awareness and statecraft well before the official declaration of independence.

Keywords: BPUPKI, Indonesian Independence, First Session, Second Session, State Foundation, Constitution.

PENDAHULUAN

Menjelang proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai langkah awal untuk mempersiapkan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia merdeka. Lembaga ini menjadi wadah penting bagi para tokoh bangsa untuk saling bertukar gagasan mengenai arah dan bentuk negara yang akan dibangun. Salah satu topik yang paling banyak menyita perhatian dalam sidang-sidang BPUPKI adalah hubungan antara agama dan negara, yang memunculkan berbagai pandangan dari kalangan nasionalis maupun agamis.

Perdebatan yang terjadi dalam forum ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan pandangan, tetapi juga menunjukkan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai dasar negara. Salah satu hasil penting dari diskusi tersebut adalah rumusan Piagam Jakarta, yang semula memuat kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun, rumusan ini kemudian diubah oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sehari setelah proklamasi, demi menjaga persatuan nasional dan merangkul seluruh elemen masyarakat yang beragam. Proses yang berlangsung dalam BPUPKI memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika politik dan ideologis saat itu. Perbedaan pendapat tidak serta-merta menjadi penghalang, melainkan dijadikan titik tolak untuk menemukan kesepakatan demi kepentingan bangsa. Diskusi-diskusi dalam BPUPKI menjadi fondasi awal terbentuknya sistem kenegaraan Indonesia yang mengakui keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Dari sinilah lahir pemikiran-pemikiran awal tentang dasar negara yang kemudian dituangkan dalam konstitusi Indonesia modern.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri dan memahami peristiwa-peristiwa di masa lalu secara sistematis dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini dianggap tepat karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Melalui metode historis, penulis berusaha menggali berbagai informasi dari sumber-sumber sejarah untuk membangun kembali gambaran yang utuh mengenai bagaimana dan mengapa BPUPKI dibentuk, serta peran strategisnya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan BPUPKI

Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, posisi mereka dalam Perang Dunia II semakin melemah akibat kekalahan berturut-turut di kawasan Asia-Pasifik sejak awal tahun 1945. Dalam situasi yang semakin terdesak, Jepang mulai menerapkan strategi baru dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dukungan rakyat Indonesia agar tidak beralih kepada pasukan Sekutu.

Pernyataan resmi mengenai janji kemerdekaan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada 7 September 1944 di hadapan parlemen Jepang. Pernyataan ini menjadi titik awal keterlibatan politik Jepang dalam memberikan ruang kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Namun, janji tersebut lebih merupakan strategi militer dan diplomatik Jepang daripada bentuk ketulusan terhadap nasib bangsa Indonesia.

Sebagai langkah konkret atas janji tersebut, pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga bernama Dokuritu Junbi Chosakai, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini diresmikan pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Pemilihan tanggal tersebut dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa pembentukan BPUPKI adalah semacam “anugerah” dari Jepang kepada rakyat Indonesia.

Pembentukan BPUPKI berada di bawah kendali pemerintahan militer Jepang di Jawa, yang dikenal sebagai Gunseikanbu. Prosesnya bersifat hierarkis, di mana struktur organisasi termasuk penunjukan ketua dan wakil ketua ditentukan sepenuhnya oleh pihak Jepang. Menariknya, posisi ketua diberikan kepada tokoh terkemuka Indonesia, Dr. KRT Radjiman

Wedyodiningrat, sedangkan posisi wakil ketua dipegang oleh perwira Jepang, Ichibangase Yosio. Hal ini mencerminkan dualisme kepemimpinan: di satu sisi kontrol tetap berada di tangan Jepang, namun di sisi lain diberikan ruang terbatas kepada tokoh Indonesia untuk tampil memimpin.

Seleksi anggota BPUPKI juga diatur oleh Jepang, namun anggotanya berasal dari berbagai kalangan nasionalis, agamawan, dan perwakilan kelompok minoritas—yang memang berpengaruh pada masa itu. Total ada 62 tokoh Indonesia yang tergabung, termasuk nama-nama besar seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Agus Salim.

Yang penting untuk dicatat, meskipun dibentuk oleh kekuatan penjajah, BPUPKI menjadi peluang emas bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk menyuarakan gagasan kemerdekaan secara terbuka. Para pemimpin bangsa memanfaatkan forum ini tidak semata-mata untuk menjalankan agenda Jepang, melainkan untuk merumuskan cita-cita bangsa secara konkret. Dengan demikian, meski awalnya merupakan bagian dari strategi kolonial, BPUPKI justru berubah menjadi sarana perjuangan politik yang sah dan terarah.

Secara keseluruhan, meskipun bukan merupakan hasil dari desakan langsung rakyat, lahirnya BPUPKI merupakan konsekuensi dari perubahan taktik Jepang dalam menghadapi kekalahan perang. Namun, keberadaan lembaga ini tidak bisa diremehkan. BPUPKI menjadi wadah penting tempat bangsa Indonesia memulai pembahasan serius tentang bentuk negara, dasar ideologi, dan rancangan konstitusi sebagai pondasi kemerdekaan yang akan segera diperjuangkan.

Sidang Pertama BPUPKI: Titik Awal Perumusan Dasar Negara

Sidang perdana Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Momen ini menjadi titik awal ketika para tokoh bangsa mulai secara resmi mendiskusikan bentuk dan dasar ideologis bagi negara Indonesia merdeka. Meskipun BPUPKI merupakan inisiatif dari pemerintahan pendudukan Jepang sebagai bagian dari strategi politiknya, para pemimpin Indonesia justru memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan gagasan kemerdekaan dengan serius dan terbuka.

Tema dalam sidang pertama ini adalah perumusan dasar negara. Para anggota diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan filosofis dan ideologis mengenai fondasi yang akan digunakan untuk membangun Indonesia yang berdaulat. Tiga tokoh utama yang memberikan kontribusi besar melalui pidatonya adalah Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pemikiran mereka memperkaya dinamika diskusi tentang arah negara masa depan.

Pada 29 Mei, Mohammad Yamin memulai dengan menyampaikan lima asas dasar negara versinya, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya semangat persatuan dalam membangun bangsa yang majemuk.

Dua hari kemudian, pada 31 Mei, Prof. Dr. Soepomo menyampaikan pandangannya yang lebih bersifat yuridis dan struktural. Ia mengemukakan gagasan tentang negara integralistik, yakni negara yang menyatukan kepentingan individu ke dalam kepentingan bersama tanpa pemisahan kekuasaan yang tegas seperti dalam sistem liberal barat.

Puncak sidang terjadi pada 1 Juni 1945 saat Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang kelak dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, ia mengemukakan lima prinsip utama: nasionalisme Indonesia, internasionalisme (atau peri kemanusiaan), demokrasi melalui musyawarah, keadilan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dan menolak konsep negara agama agar semua golongan merasa terwakili dalam negara Indonesia.

Hal yang menonjol dari sidang ini bukan hanya isi pidato-pidato yang disampaikan, tetapi juga suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara kalangan nasionalis dan religius, dialog berlangsung secara relatif harmonis dengan semangat untuk mencari titik temu.

Walaupun belum menghasilkan keputusan final, sidang pertama ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia. Sebagai kelanjutan dari sidang, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rumusan naskah yang lebih konkret berdasarkan masukan-masukan yang muncul selama sidang.

Sidang Kedua BPUPKI: Perumusan Awal Konstitusi Negara Indonesia

Setelah sidang pertama BPUPKI berhasil menggagas konsep dasar negara, proses dilanjutkan melalui sidang kedua yang berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945. Berbeda dengan diskusi awal yang lebih bersifat ideologis dan filosofis, sidang kedua ini diarahkan pada aspek-aspek yang lebih teknis dan konkret, yaitu penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar serta struktur pemerintahan negara Indonesia merdeka.

Agenda utama dalam sidang ini meliputi pembahasan tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, batas wilayah Indonesia, kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara. Suasana diskusi berlangsung lebih intens dan sistematis, mencerminkan transisi dari wacana kemerdekaan menuju pembentukan kerangka institusional negara.

Salah satu perkembangan signifikan adalah dibentuknya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ir. Soekarno sebagai ketua. Panitia ini bertugas menyusun draft awal konstitusi, yang nantinya menjadi fondasi hukum tertinggi negara. Dalam diskusi yang berlangsung, sebagian besar anggota BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, bukan monarki atau bentuk lainnya.

Selain itu, sistem pemerintahan yang disepakati mengarah pada model presidensial, di mana presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun dalam praktik politik pasca kemerdekaan, sistem ini mengalami beberapa penyesuaian seiring dinamika politik dan kebutuhan nasional.

Pencapaian penting lainnya dari sidang ini adalah penyusunan naskah Pembukaan UUD 1945 yang mengacu pada rumusan Piagam Jakarta. Namun, salah satu bagian naskah yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” masih menimbulkan perdebatan. Kalimat tersebut menjadi isu sensitif yang menyentuh keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip inklusivitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Meski tidak diselesaikan dalam sidang ini, persoalan tersebut menjadi perhatian utama dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) selanjutnya.

Sidang kedua BPUPKI memperlihatkan bahwa para pendiri bangsa tidak hanya idealis dalam memimpikan kemerdekaan, tetapi juga realistis dan sistematis dalam membangun landasan hukum dan kelembagaan negara. Meskipun berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sidang ini berhasil merumuskan dokumen-dokumen penting yang menjadi pondasi penyelenggaraan negara pasca kemerdekaan. Hasilnya kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

KESIMPULAN

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan salah satu titik penting dalam rangkaian sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Meskipun inisiatif pendiriannya berasal dari pemerintah pendudukan Jepang yang saat itu berada dalam posisi terdesak pada Perang Dunia II, kehadiran BPUPKI justru memberikan peluang strategis bagi bangsa Indonesia untuk secara serius mempersiapkan kemerdekaannya. Janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Jepang menjadi bagian dari

strategi politik mereka, namun para tokoh nasional Indonesia mampu mengubah situasi tersebut menjadi ajang untuk menyusun arah masa depan bangsa secara substansial dan terstruktur.

Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung mulai 29 Mei 1945 menjadi forum penting di mana gagasan-gagasan mengenai dasar negara dikemukakan oleh tokoh-tokoh utama bangsa. Di antara yang menonjol adalah Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, dan Prof. Dr. Soepomo, yang masing-masing menyampaikan pemikiran tentang dasar filosofis negara Indonesia. Ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda Soepomo dengan konsep negara integralistik, Yamin dengan lima asas kebangsaan, dan Soekarno dengan rumusan Pancasila pada 1 Juni 1945. Sidang ini tidak hanya memperlihatkan adanya keragaman pemikiran, tetapi juga menunjukkan kedewasaan politik dan kedalaman visi kenegaraan yang telah dimiliki oleh para pemimpin bangsa sebelum kemerdekaan formal dicapai.

Sidang kedua yang diselenggarakan pada 10 hingga 17 Juli 1945 berfokus pada aspek konstitusional dan teknis penyelenggaraan negara. Dalam forum ini, dibentuk sejumlah panitia seperti Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan Panitia Ekonomi dan Keuangan untuk mengkaji lebih rinci struktur pemerintahan dan sistem hukum negara Indonesia merdeka. Salah satu hasil terpenting dari sidang ini adalah disusunnya rancangan UUD 1945, termasuk bagian pembukaannya yang mengacu pada Piagam Jakarta. Meskipun terjadi perubahan redaksional pada naskah Piagam Jakarta pasca-proklamasi untuk menyesuaikan dengan keberagaman masyarakat Indonesia, sidang kedua tetap memainkan peran sentral dalam peletakan dasar-dasar ketatanegaraan Indonesia.

Jika ditinjau secara keseluruhan, proses pembentukan BPUPKI dan kedua sidangnya memperlihatkan kecerdasan politik, kematangan berpikir, serta kemampuan strategis para pendiri bangsa. Mereka tidak bersikap pasif dalam dinamika sejarah yang digerakkan oleh kekuatan asing, melainkan secara aktif mengambil alih arah perkembangan politik menuju kemerdekaan. BPUPKI memang dibentuk oleh kekuatan pendudukan, namun proses-proses yang terjadi di dalamnya dijalankan dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan cerdas, diplomatis, dan penuh kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar Gonggong. (2014). *Indonesia dalam Arus Sejarah: Kemerdekaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). "Proses Perumusan Dasar Negara". Diakses dari: <https://www.bpip.go.id/Diakses> dari: <https://republika.co.id/berita/qc9n8b>.
- Ilyas Ilyas (2023). *Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta*. Buletin Al Turas (UIN Jakarta).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Sejarah Indonesia Kelas XI*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2005). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Nana Setialaksana (2017). Peran BPUPKI 1945 dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Artefak (Unigal)*, Vol 4 No 2.
- Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas. (2021). *Peran BPUPKI dalam Pembentukan Konstitusi Indonesia*.
- Republika. (2020). "BPUPKI: Tonggak Awal Kemerdekaan Indonesia".
- Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). (2021). "BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara". Artikel Edukasi Sejarah.
- Yusuf Budi Prasetya Santosa & Rina Kurnia (2023). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei–Juli 1945. *Chronologia (Jurnal Historis)*, Vol 2 No 3.